



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 01 Februari 2017

Halaman: 4

PENGAJUAN KERINGINAN SAMPAI AKHIR JUNI

93.430 Lembar SPPT PBB Dibagikan



Sekda Pemkot Yogyakarta Titik Sulastris menyerahkan SPPT PBB secara simbolis kepada lurah.

YOGYA (MERAPI) - Sebanyak 93.430 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017 di Kota Yogyakarta didistribusikan ke wajib pajak melalui lurah. Bagi wajib pajak yang merasa keberatan dapat mengajukan keringanan pembayaran PBB itu maksimal akhir Juni 2017.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Kadri Renggono menyampaikan pengajuan pengurangan pembayaran atau keberatan PBB dilayani 1 Maret sampai 30 Juni 2017. Selama ini keringanan pembayaran PBB telah diberikan kepada yang berhak seperti wajib pajak PBB untuk bangunan cagar budaya (BCB) dan veteran.

"Jika wajib pajak keberatan bisa mengajukan keringanan. Kalau pengajuannya setelah 30 Juni, kami tidak dapat mempro-

sesnya," kata Kadri di sela pembagian SPPT PBB 2017 di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (31/1).

Besaran keringanan pajak yang diberikan bervariasi. Untuk wajib pajak PBB BCB keringanan pembayaran PBB berkisar 25-35 persen dari nilai ketetapan pajak. Sedangkan bagi wajib pajak PBB kalangan veteran pengurangan antara 10-75 persen dari nilai ketetapan pajak. Insentif PBB juga diberikan kepada wajib pajak BCB setelah membayar pajak.

Total ketetapan nilai PBB dari SPPT yang dibagikan kepada wajib pajak tahun 2017 mencapai Rp 79,5 miliar. Pemkot Yogyakarta hanya menetapkan target realisasi PBB sebanyak Rp 57,8 miliar. Dia mengakui penetapan target realisasi itu memiliki selisih yang jauh dari ketetapan. Hal itu karena penetapan target disesuaikan dengan realisasi PBB tahun sebelumnya sebesar Rp 56,4 miliar.

"Kendalanya masyarakat tidak tertib dalam membayar pajak tahunan ini. Selain itu ada wajib pajak yang berada di luar kota, sehingga ada keterlambatan dalam pembayaran," ujarnya.

Selain itu juga ada tunggakan pembayaran PBB yang tercatat sejak tahun 1994 yang mencapai sekitar Rp 54 miliar. Dia mengutarakan berbagai upaya dilakukan seperti penagihan dan verifikasi ulang data wajib pajak yang melibatkan kelurahan secara bertahap. Rencananya ada pemutihan atau penghapusan tunggakan PBB itu.

Untuk memaksimalkan realisasi PBB tahun ini, dibentuk tim penagihan PBB di kelurahan, mengadakan pekan pembayaran PBB dan kerja sama dengan swasta guna memudahkan pembayaran. "Targetnya paling lambat 31 Maret nanti, SPPT PBB dapat diterima seluruh wajib pajak. Pembayaran jatuh tempo PBB 30 September," tambah Kadri.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemkot Yogyakarta Titik Sulastris meminta kelurahan untuk memastikan SPPT PBB itu sampai ke wajib pajak. Selain itu perlu ditumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak karena untuk kepentingan pembangunan bagi masyarakat. Dalam kesempatan itu juga diserahkan surat penyerahan pajak daerah kepada Bank BPD DIY. "Selama ini pajak adalah sektor utama penerimaan untuk pembangunan. Kami akan mengawal penerimaan PBB itu sebaik-baiknya," ucap Titik.

(Tri-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005